



Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Desa dan Anggaran Responsif Gender di Desa Duara, Kabupaten Lingga Kepulauan Riau

Sri Wahyuni, Marisa Elsera, Nikodemus Niko

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Jln. Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: October 07, 2023

Revised: December 08, 2023

Available online: December 30, 2023

KEYWORDS

Village Planning, Gender Budget, Socialization

CORRESPONDENCE

Name: Nikomedus Niko

E-mail: nikodemusn@umrah.ac.id

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it can be said that the government's commitment to improve village development by improving the quality of life of rural communities. This law has mandated the government to allocate village funds as a source of funds to manage the potential of villages. Although it has seen a positive impact on the Village Fund program so far, gender issues are often overlooked. In the implementation of the Village Fund program, it is also necessary to pay attention to the relationship between men and women, especially in the management of programs allocated from the Village Fund. Therefore, the Community Service (PKM) activities that we carry out are socialization of village planning preparation and gender responsive budgets in Duara village, Lingga district. The method of implementing community service activities is in the form of socialization activities with material on the preparation of a gender-responsive budget for village funds. If a village program held has considered gender equality in meeting the practical needs and strategic needs of both men and women, it can be said that the program has been successful and gender responsive.

Pendahuluan

Program kesetaraan dan keadilan gender ini sebagai satu diantara strategi dalam optimalisasi peran perempuan Indonesia dalam pembangunan (Darmi, 2016). Untuk mempercepat mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, pemerintah telah mengeluarkan intruksi presiden No. 9 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan nasional. Tentunya untuk mengimplementasikan inpres ini perlu perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam pembangunan (Darmi, 2016).

Di Provinsi Kepulauan Riau, belum semua Kabupaten memiliki peraturan khusus tentang Perda PUG (Arieta et al., 2022). Pada dasarnya PARG bukanlah anggaran yang dibagi rata laki-laki lima puluh persen dan perempuan lima puluh persen, akan tetapi bagaimana memaksimalkan anggaran yang ada dengan melihat bahwa laki-laki dan perempuan punya kebutuhan yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk membangun kemandirian perempuan melalui sumber daya yang proporsional. Hal ini disebutkan Wahyuni, Niko & Elsera (2022) sebagai *self-agency* perempuan.

Dalam penyusunan anggaran responsif gender ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan diantaranya; pertama anggaran responsif gender selalu menggunakan analisa gender mulai dari perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari anggaran tersebut. Kedua anggaran responsif gender yang efektif selalu dibangun berdasarkan proses konsultasi yang interaktif dengan masyarakat perempuan dan laki-laki, kalangan eksekutif dan legislatif. Ketiga anggaran responsif gender seyogyanya melihat kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Pada tahap penyusunan ARG ini untuk melihat dan mengatasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang pertama dilihat dari akses, apakah laki-laki dan perempuan punya akses yang sama dalam pembangunan. Formulasi kebijakan diwarnai oleh pola komunikasi *top down*, bukan *bottom up*, khususnya dalam formulasi kebijakan sosialisasi pengarusutamaan gender (Lestari & Dewi, 2010). Kemudian partisipasi, apakah laki-laki dan perempuan punya partisipasi yang sama dalam pembangunan, kemudian *control*, apakah laki-laki dan perempuan punya kontrol atau pengawasan yang sama terhadap pembangunan, dan yang terakhir manfaat, apakah laki-laki dan perempuan mendapatkan manfaat yang sama dalam memanfaatkan pembangunan (Nurhaeni, 2011; Niko, 2019; Niko, 2020; Setiawan dkk., 2023).

ARG sendiri mengalami pergeseran makna dimana pada dasarnya anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki dan memberikan dampak/manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Perluasan definisi tersebut menjadi ARG diarahkan untuk menghapuskan kesenjangan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara menyeluruh, yang dilakukan melalui analisis gender. Berdasarkan hal tersebut, kata kunci analisis gender menjadi poin dalam anggaran responsif gender.

Kajian terdahulu yang dilakukan oleh Maimanah, Paranoan dan Amin (2015) menyebutkan bahwa hambatan dalam implementasi perwujudan kesetaraan gender terletak pada pembiayaan program, kualitas SDM, keterbatasan informasi, serta kurangnya sosialisasi. Sementara itu, kajian Pusadan (2017) mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender adalah melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Arti lain bahwa perempuan memiliki kebutuhan pembangunan yang berbeda dengan laki-laki, serta pengalaman mereka dalam relasi rumah tangga juga perlu menjadi peta jalan dalam pembuatan program (Wahyuni & Solina, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dalam kegiatan yang kami ajukan dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini adalah sosialisasi penyusunan perencanaan desa dan anggaran responsif gender di Desa Duara, Labupaten Lingga yang belum mengadopsi ARG dalam penyusunan dan penganggaran anggaran Dana Desa. Kemudian, Desa Duara memiliki potensi sumber daya manusia perempuan yang masih dalam kategorisasi keluarga menengah ke bawah. Sehingga kegiatan penyadaran perangkat desa ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi program-program pemberdayaan perempuan melalui anggaran Dana Desa.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan landasan yang merujuk pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Indikator Kinerja Utama dari Kemendikbud, dimana dosen wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan luaran yang diharapkan adalah artikel publikasi. Berdasarkan hal ini, kegiatan sosialisasi yang dilakukan menargetkan *output* berupa kemampuan perangkat desa dalam mengaplikasikan penganggaran dana desa yang responsif gender. Oleh karena itu, implementasi tridharma perguruan tinggi yang kami laksanakan, yaitu melakukan pengabdian kepada masyarakat. Mitra dari kegiatan ini adalah masyarakat di Desa Duara, Kabupaten Lingga Kepulauan Riau.

Metode

Tahapan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah menerapkan sosialisasi berbasis tatap muka dan penyampaian materi tentang penyusunan perencanaan desa dan anggaran responsif gender. Luaran kegiatan ini berupa laporan akhir dan artikel publikasi PKM. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Duara Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Adapun peserta yang ditargetkan berjumlah 25 orang, dengan mengutamakan perangkat desa perempuan. Hal ini karena sosialisasi gender dan pelibatan perempuan dalam proses penganggaran responsif gender di desa masih minim. Meski demikian, laki-laki tidak tertinggal dalam berpartisipasi.

Alat dan Bahan Penunjang Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Balai Pertemuan Desa Duara Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Adapun alat penunjang yang diperlukan selama kegiatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Perangkat *sound system* (*microphone* dan *pengeras suara/speakers*),
- b. Layar proyektor/*infocus* sebagai penunjang presentasi,
- c. Komputer sebagai penunjang presentasi;
- d. Kebutuhan makan (*snack* dan makan siang) dan minum (kopi, teh dan air putih).

Hasil dan Pembahasan

Kondisi Objektif

Perangkat desa atau aparatur di Desa Duara secara umum didominasi oleh laki-laki. Meskipun diataranya adalah perempuan, jumlahnya tidak banyak. Hal ini menandakan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa masih belum dipertimbangkan secara masif di wilayah desa. Apalagi memikirkan

anggaran yang responsif gender, dalam implementasi afirmasi keterwakilan perempuan saja masih sulit dicapai. Pada dasarnya aparat desa masih belum mempertimbangkan keterwakilan gender dalam penyusunan Dana Desa (Aprianti, 2022; Adhayanto dkk., 2023).

Kegiatan sosialisasi kepada perangkat desa dan masyarakat untuk menerapkan anggaran desa yang responsif gender di Desa Duara, Kabupaten Lingga ini adalah bentuk implementasi amanat Undang-Undang tentang desa yang semestinya sudah mengadopsi pengarusutamaan gender (PUG) dalam perencanaan, penyusunan hingga pengesahan anggaran Dana Desa. Sehingga kegiatan sosialisasi ini menjadi peta jalan bagi perangkat Desa Duara dalam menyusun anggaran responsif gender pada periode anggaran berikutnya.

Adapun materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian ini, yaitu berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). ARG merupakan bagian dari PPRG. ARG ini bukanlah anggaran terpisah bagi kebutuhan laki-laki dan kebutuhan perempuan, melainkan strategi untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam proses penganggaran, dan menerjemahkan komitmen para pihak untuk mewujudkan kesetaraan gender ke dalam komitmen anggaran yang dibuat. Prinsip ini semestinya sudah diadopsi ke dalam anggaran Dana Desa. Namun situasi yang terjadi di desa-desa yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, masih memahami prinsip anggaran responsif gender dengan persepsi yang berbeda-beda.

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
	2018	2019	2020	2021
Tanjungpinang	68.57	76.13	76.44	76.64
Bintan	63.41	69.71	69.64	73.04
Batam	53.29	58.40	59.10	58.38
Tanjungbalai Karimun	57.03	64.17	64.05	63.89
Lingga	46.08	48.96	48.52	48.50
Natuna	49.17	42.02	42.99	42.95
Kepulauan Anambas	57.32	57.74	62.57	67.66
Provinsi	66.18	61.59	62.02	58.97

Gambar 1. Situasi eksisting IPG Kepulauan Riau
 Sumber: Materi disampaikan oleh Marisa Elsera

Ketika berbicara ARG yang menjadi prinsip dasarnya adalah transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Secara substansial, *pro-poor budget* dan *gender budget* pada hakikatnya terletak pada bagaimana mengubah kehidupan masyarakat miskin menjadi lebih baik, penghormatan pada orang miskin (laki-laki dan perempuan). *Pro-poor budget* pada dasarnya merupakan netral gender apabila tidak mengintegrasikan kebutuhan aspek gender dan menilai ketimpangan gender ke dalamnya.

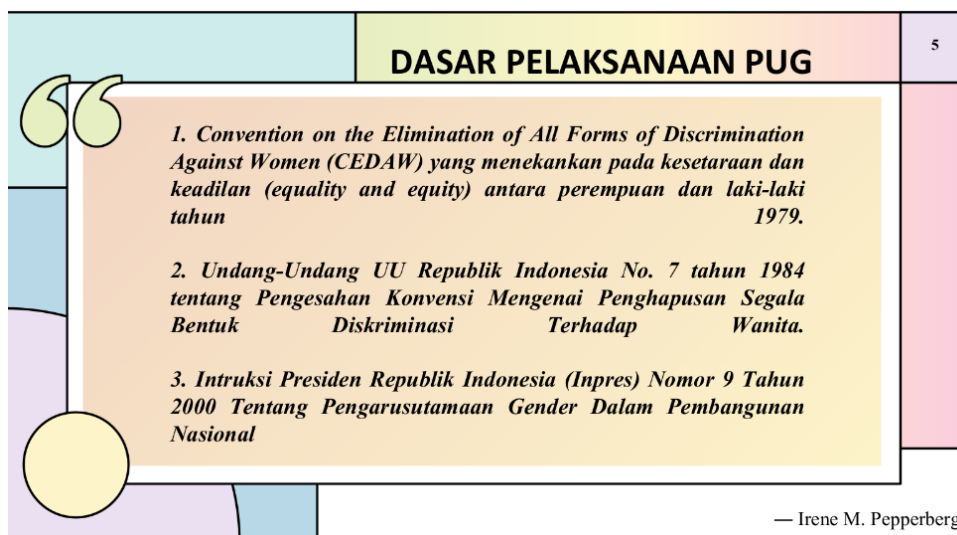
Ketika berbicara gender, seringkali terjadi salah kaprah bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, dan ketika berbicara ARG adalah anggaran yang dibagi rata antara laki-laki dan perempuan, asumsi yang dibangun adalah jika laki-laki diberikan program kegiatan maka perempuan juga mendapatkan porsi yang sama. Berdasarkan situasi ini, dapat diterangkan kondisi objektif pemerintahan di Desa Duara, yaitu: 1) masih kurangnya pengetahuan tentang informasi mengenai perencanaan dan penganggaran responsif gender pada pengelolaan Dana Desa (DD); 2) program PPRG yang belum tersosialisasi secara masif hingga di tingkat pemerintahan desa.

Sosialisasi Penyusunan Perencanaan Desa dan Anggaran Responsif Gender

Tingkat pengetahuan dan sikap perangkat desa akan sangat mempengaruhi perilaku dan peran aparat desa. Dalam hal ini, terjadi efek ketakutan dari aparat desa dalam pemanfaatan dana desa karena proses penganggaran yang berpotensi menimbulkan temuan kasus, sehingga perlu adanya pendampingan

dimana dimulai dari sosialisasi anggaran, penyusunan kegiatan hingga pada keputusan pendanaan (Amaliah & Julia, 2019).

Pada sosialisasi ini, disampaikan oleh Marisa Elsera, M.Si. mengenai penganggaran yang responsif gender. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Desa Duara yang memberikan apresiasi terhadap pengabdian yang diselenggarakan. Pada sesi pertama, materi yang disampaikan terkait dengan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional.



Gambar 2. Materi Oleh Marisa Elsera

Berdasarkan penyampaian materi yang berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Pada sesi mengenai penyusunan ARG, perangkat desa setempat tidak ada yang mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi/tanya jawab. Hal ini senada dengan hasil studi Wulandhari (2022) yang mengungkapkan bahwa perangkat atau aparatur di tingkat daerah pun masih banyak yang belum memahami sepenuhnya optimalisasi anggaran responsif gender. Namun, dalam konteks ini, artinya bahwa tahapan sosialisasi merupakan tahapan awal dari penyusunan anggaran Dana Desa.



Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Marisa Elsera

Pada sosialisasi tentang penganggaran responsif gender ini, para peserta sangat antusias mengikuti seluruh paparan materi. Meningkatnya peran perempuan dalam proses pemerintahan di desa tidak terlepas

dari keberhasilan upaya advokasi yang dilakukan dalam memperjuangkan alokasi Dana Desa (Prabaningrum & Abheseka, 2020). Terdapat tiga katagori alokasi yang dianggap sebagai anggaran responsif gender, yaitu: (1) anggaran belanja khusus yang diperuntukan bagi pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan; (2) alokasi anggaran belanja rutin untuk meningkatkan kapasitas kerja laki-laki dan perempuan dalam pemerintahan; dan (3) alokasi anggaran belanja umum bagi pengarusutamaan gender.



Gambar 4. Antusias peserta sosialisasi

Kesimpulan dan Saran

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi penyusunan perencanaan desa dan anggaran responsif gender di Desa Duara, Kabupaten Lingga diikuti oleh lebih dari 25 peserta yang berpartisipasi. Para peserta berhasil mengikuti kegiatan dengan baik, dan mendapatkan inspirasi beragam program desa yang responsif gender. Bahkan beberapa peserta dengan kesediaan mereka di *coaching* untuk penyusunan anggaran desa yang responsif gender lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Adhayanto, O., Nazaki, N., Rahmawati, N., & Niko, N. (2023). Pendampingan Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Benan Kecamatan Katang Bidare, Kabupaten Lingga. *ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*, 1(6), 105-117.
- Amaliah, I., & Julia, A. (2019). Identifikasi Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Perangkat Desa Terhadap Dokumen Perencanaan Dalam Upaya Pemanfaatan Dana Hibah Desa: Suatu Survey di Desa Mekarwangi Kecamatan Cibatu. *ISEI Economic Review*, 3(1), 1-7.
- Aprianti, H. (2022). Anggaran Responsif Gender: Meminimalisir Disparitas Partisipasi dan Akses Perempuan dalam Pembangunan. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 150-162.
- Arieta, S., Niko, N., Rahmaniah, S. E., Rupita, R., & Iqiasi, T. S. (2022). Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender: Suatu Studi Pendahuluan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(3), 615-628. <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i3.2151>
- Darmi, T. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (Study pada Pengelolaan Dana Desa). *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(1), 21-27.
- Lestari, P., & Dewi, M. A. (2010). Model Komunikasi dalam Sosialisasi Pengarusutamaan dan Anggaran Responsif Gender di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 191-203.
- Maimanah, S., Paranoan, D. B., & Amin, M. J. (2017). Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative Reform*, 3(1), 127-137.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 58-76.

- Niko, N. (2020). Gender Struggle: What Can We Learn from the Dayak Benawan Women?. *Asia Social Issues*, 13(2), 269-292.
- Nurhaeni, I. D. A., Habsari, S. K., & Listyasari, S. I. (2011). Efektivitas implementasi kebijakan anggaran responsif gender. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(01), 74-86.
- Prabaningrum, G., dan Abheseka, N.M.R., 2020. Increasing Women's Political Capacities and Advocacy for Accessing Village Fund Allocations through the Women's School. In A. Savirani, R. Diprose, A.S. Hartoto, and K.M.P. Setiawan (Eds), *Forging Pathways for Gender-inclusive Development in Rural Indonesia: Case Studies of Women's Collective Action and Influence on Village Law Implementation*. The University of Melbourne, Universitas Gadjah Mada and MAMPU, pp. 111-136. <https://doi.org/10.46580/124328>
- Setiawan, A., Niko, N., Charin, R. O. P., Casiavera, C., Rahmi, K., & Wahyudi, H. (2023). 'Care for Environment, Care for Each Other': Environmental Values and GESI (Gender Equality and Social Inclusion) Institutionalization among Secondary Education Students in Kepulauan Riau Province, Indonesia. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 70, p. 06002). EDP Sciences.
- Wahyuni, S., & Solina, E. (2021). Overcoming poverty in Laut Tribe households through gender relations on Lipan Island, Riau Islands Province. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(1), 34-42.
- Wahyuni, S., Niko, N., & Elsera, M. (2022). Self-Agency Perempuan Nelayan di Kampung Bulang, Kota Tanjungpinang Kepulauan Riau. *BESTARI*, 3(1), 48-59.
- Wulandhari, D. A. (2022). Analisis Anggaran Responsif Gender Di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2017-2018. *Journal of Politic and Government Studies*, 11(3), 311-324.